

Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangduwur dalam Pengembangan Potensi Wisata Pantai Menganti Kabupaten Kebumen

Praba Wandira*¹, dan Puji Lestari²

^{1,2}Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Article History

Disubmit 20 Januari 2021

Diterima 30 Juni 2021

Diterbitkan 2 Juli 2021

Kata Kunci

pemberdayaan masyarakat;
potensi wisata;
pantai menganti

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi wisata Pantai Menganti Kebumen dan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sejak awal perencanaan pembangunan. Pemberdayaan dilakukan berdasarkan tujuh tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pengkajian (assessment), tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap performalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. (2) Pemberdayaan dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Desa Karangduwur dengan LMDH selaku pengelola objek wisata Pantai Menganti. Bentuk kerjasama tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Penerapan kebijakan ini dinilai berdasarkan 5 variabel yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Abstract

The purpose of this research is to determine community empowerment in developing tourism potential of Menganti Beach, Kebumen and to find out the policies implemented by the village government in community empowerment. It is in Menganti Beach, Karangduwur Village, Ayah Subdistrict, Kebumen Regency. Data collection techniques by interview, observation, and documentation. Data validity using data triangulation techniques. The results of this study indicate that (1) Community empowerment is carried out from the beginning of development planning. Empowerment is carried out based on seven stages which include the preparation stage, the assessment stage, the alternative program or activity planning stage, the action plan performance stage, the program or activity implementation stage, the evaluation stage, and the termination stage. (2) Empowerment is carried out in collaboration between the Karangduwur Village Government and LMDH as the manager of the Menganti Beach tourist attraction. This form of cooperation is an implementation of the Kebumen Regency Regional Regulation Number 9 of 2007 concerning the Establishment of Village Community Institutions and Village Community Institutions. The implementation of this policy is assessed based on 5 variables, namely: standard and policy objectives, resources, communication between organizations and strengthening activities, characteristics of implementing agents, social, economic and political conditions.

* E-mail: praba.wandira11@gmail.com

Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang mendominasi, Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat potensial. Wilayah Pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa (UU RI No 27 Tahun 2007).

Daya Tarik Wisata menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 adalah “segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai-nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”. Sedang Hadiwijoyo dalam Muljadi (2009:13), mengatakan obyek dan daya tarik adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan.

Potensi wilayah pesisir dan laut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Salah satu pemanfaatan wilayah pantai adalah dengan kegiatan wisata. Kegiatan wisata mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, hal ini didukung dengan UU No 10 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan rasa cinta lingkungan sekaligus melestarikan alam dan budaya setempat.

Desa sebagai basis desentralisasi sangat beralasan karena sebagian masyarakat hidup dalam komunitas perdesaan. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, desa terkelompok dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintah yang otonom. Selain itu, desentralisasi pada tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Penerapan otonomi daerah melahirkan paradigma pemberdayaan masyarakat. Melalui paradigma ini masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengelola sumberdaya alam dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, merupakan salah satu desa yang telah menerapkan dan memanfaatkan secara baik kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah Desa Karangduwur memanfaatkan potensi yang ada di Pantai Menganti untuk memanfaatkan secara maksimal sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Lembaga desa yang ada juga ikut serta dalam proses pengembangan potensi wisata dari Pantai Menganti tersebut, antara lain seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karangtaruna serta kelompok masyarakat seperti kelompok petani dan nelayan Desa Karangduwur. Melihat kondisi geografis dari Desa Karangduwur yang terletak di jalur pantai selatan

Pulau Jawa serta dikelilingi oleh pegunungan, membuat daerah ini memiliki potensi wisata yang sangat baik. Berbekal kondisi alam sekitar, Desa Karangduwur mampu menawarkan objek wisata berupa Pantai yang dikelilingi oleh pegunungan. Hal-hal tersebut mampu menarik perhatian wisatawan domestik dan asing untuk datang menikmati keindahan alam yang disuguhkan atau sekedar mengabadikan momen melalui foto. Jumlah pengunjung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2016 jumlah wisatawan mencapai 334.208 pengunjung, tahun 2017 sebanyak 417.311 pengunjung, tahun 2018 sebanyak 459.815 pengunjung, dan tahun 2019 sebanyak 467.860 pengunjung. (LMDH Tahun 2020). Tingginya jumlah kunjungan dapat berpengaruh pada lingkungan alam dari Pantai Menganti. Potensi pantai yang ada perlu dijaga dan dilestarikan supaya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Desa Karangduwur menjadi cara yang tepat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Hal ini tentu tidak terlepas dari campur tangan dari pemerintah desa serta lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat sehingga tidak hanya mampu meningkatkan namun juga mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Sumodiningrat (2009:7) mengatakan, pemberdayaan adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri, dengan tujuan meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non-fisik dalam kehidupan masyarakat (dalam Widiastuti, dkk. 2015: 38). Sedang Syamsul (2019:25) mengatakan partisipasi masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan dengan pendekatan dari bawah, dikenal sebagai pendekatan partisipasif. Sehingga segala keputusan dalam kegiatan masyarakat tidak ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, akan tetapi didasarkan pada masyarakat itu sendiri. Proses awal pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangduwur bersama lembaga kemasyarakatan seperti, LMDH, Karangtaruna, RT, RW, PKK, kelompok tani, kelompok nelayan. Lewat lembaga tersebut masyarakat diberi sosialisasi terkait potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian pada tahap berikutnya pemerintah desa bekerja sama dengan beberapa pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang-bidang tertentu untuk mengadakan pelatihan terkait penyelenggaraan objek wisata. Beberapa pihak yang menjadi mitra kerja sama antara lain: Disporapar Kabupaten Kebumen yang memberikan pelatihan pemandu wisata, pengelolaan penginapan, dan pedagang. Kemudian, Perhutani memberikan pembinaan terkait pelestarian kawasan hutan, penerapan e-tiket, dan kebersihan. Polsek dan Koramil, memberikan pembinaan tentang tata kendaraan (parkir), dan keamanan objek wisata. *Sentral Java Surfe Club* (SJSC) memberikan pelatihan bahasa Inggris. Tim SAR lawet perkasa memberikan pelatihan tentang pertolongan korban bencana laut atau penjaga pantai. (Sumber hasil wawancara Kepala Desa Karangduwur, 14 Oktober 2020).

Penelitian ini Bertujuan untuk mendiskripsikan:
(1) untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat Desa

Karangduwur dalam pengembangan objek wisata Pantai Menganti; dan (2) untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan Pemerintah Desa Karangduwur dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengembangan potensi wisata Pantai Menganti.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Penetapan fokus penelitian ini adalah: (1) Pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Karangduwur dalam upaya mengembangkan potensi wisata Pantai Menganti. (2) Kebijakan yang diterapkan Pemerintah Desa Karangduwur dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengembangan potensi wisata Pantai Menganti. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa Karangduwur melakukan pembangunan pada sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi yang ada. Namun terlaksananya program tersebut membutuhkan partisipasi dari masyarakat baik dari perencanaan ataupun pelaksanaan. Maka dilakukan pemberdayaan masyarakat supaya program-program yang akan dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sehingga nantinya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif baik perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Hal ini berkaitan dengan pengertian pemberdayaan menurut Sumodiningrat, pemberdayaan adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan (Sumodiningrat, 2009:7).

Proses pemberdayaan masyarakat menurut Soekanto (2007:63) memiliki tahapan atau langkah yang dilakukan, yakni; tahap persiapan, tahap pengkajian "assessment", tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap formalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan "implementasi", tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Berkaitan dengan tahapan dan langkah yang telah disebutkan Desa Karangduwur melakukan pemberdayaan sebagai berikut.

Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus di kerjakan yaitu pertama, penyiapan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dan dilakukan secara non-direktif. Di Desa Karangduwur yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat adalah pemerintah desa dengan dibantu oleh lembaga dan kelompok masyarakat. Kemudian, pada tahap ini pemerintah desa bersama lembaga juga membangun mitra kerja sama dengan pihak luar antara lain Dispo-

rapar, Perhutani, Polsek, Koramil, dan CJSC yang nantinya akan membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam khususnya peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Tahapan Pengkajian "Assesment"

Pada proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan "feel needs" dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Pada tahap ini pemerintah desa khususnya kepala desa mengidentifikasi bahwa kesejahteraan masyarakat masih dibawah rata-rata. Masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, peternak dan nelayan memiliki kesadaran yang minim terhadap potensi yang ada pada desanya. Sehingga dengan melihat potensi alam yang ada di Pantai Menganti, kepala desa membuat perencanaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mengembangkan potensi tersebut menjadi objek wisata yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangduwur. Dalam hal ini beberapa hal yang perlu di perhatikan adalah terkait sumber daya manusia yang masih belum cukup dalam penyelenggaraan objek wisata, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan yang tepat mengenai pemanfaatan, pengelolaan, pelayanan, pelestarian jangka panjang, pemasaran, serta mampu memberikan inovasi terhadap pengembangan objek wisata.

Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan "exchange agent" secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam terlaksananya pengembangan potensi pariwisata. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari pengembangan objek wisata yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa. Di Desa Karangduwur perencanaan program dilakukan dengan cara sosialisasi dan kemudian di musyawarahkan. Usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan musyawarah di lingkup yang kecil, dalam hal ini Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menjadi pilihan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi. Musyawarah menjadi cara yang dipilih oleh pemerintah desa supaya masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait permasalahan. Kemudian semua usulan dan tanggapan dari masyarakat ditampung oleh ketua RT, RW, atau perangkat desa lainnya. Cara yang sama juga dilakukan oleh lembaga dan kelompok masyarakat lain yaitu PKK, Karangtaruna, kelompok petani, dan kelompok nelayan. Dari hasil musyawarah tersebut diperoleh permasalahan utama yaitu minimnya pengetahuan terkait penyelenggaraan objek wisata. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diadakan pemberdayaan mengenai peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Tahap Performalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dalam tahap performalisasi rencana aksi, pemerintah desa bekerja sama dengan beberapa pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang-bidang tertentu untuk mengadakan pelatihan terkait penyelenggaraan objek wisata. Beberapa pihak yang menjadi mitra kerja sama antara lain; Disporapar Kabupaten Kebumen yang memberikan pelatihan pemandu wisata, pengelolaan penginapan, dan pedagang. Kemudian, Perhutani memberikan pembinaan terkait pelestarian kawasan hutan, penerapan e-tiket, dan kebersihan. Polsek dan Koramil, memberikan pembinaan tentang tata kendaraan (parkir), dan keamanan objek wisata. Sentral Java Surf Club (SJSC) memberikan pelatihan bahasa Inggris. Tim SAR lawet perkasa memberikan pelatihan tentang pertolongan korban bencana laut atau penjaga pantai.

Tahap pelaksanaan “Implementasi” Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melencong saat dilapangan. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan objek wisata dilakukan pada waktu yang berbeda-beda antar lembaga satu dengan lainnya. Pelatihan yang diberikan Disporapar dilakukan dua kali dalam satu tahun pada bulan Juli dan Desember. Kemudian Perhutani yang memberikan pelatihan dua kali dalam satu tahun pada musim tanam. Polsek dan Koramil memberikan pembinaan setahun sekali pada bulan Maret. Kemudian pelatihan Bahasa Inggris yang diberikan satu minggu sekali oleh SJSC. Kemudian pembinaan terkait keamanan laut oleh Tim SAR dilakukan dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi jadwal-jadwal tersebut tidak bersifat mengikat dan bisa berubah sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pemerintah desa.

Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek dapat membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi oleh pemerintah desa dilakukan pada rapat akhir tahun, dimana dalam acara tersebut seluruh komponen masyarakat seperti lembaga dan kelompok masyarakat ikut dilibatkan. Dalam acara tersebut pelaksanaan program

selama satu tahun terakhir akan dibahas termasuk di dalamnya terkait pemberdayaan masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan akan dibahas dan diperbaiki dalam perencanaan program di tahun yang akan datang.

7. Tahap Terminasi.

Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Pemberdayaan masyarakat di Desa Karangduwur masih berlanjut hingga saat ini. Program yang diberikan oleh beberapa lembaga masih dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini berkaitan dengan objek wisata Pantai Menganti yang diharapkan dapat menjadi destinasi wisata yang dikenal dunia, sehingga perlu dilakukan pengembangan dengan mengikuti perkembangan zaman. Sejalan dengan hal tersebut sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan secara untuk menyesuaikan perkembangan yang ada. Maka pemberdayaan masyarakat juga perlu terus dilakukan.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangduwur tidak terlepas dari peran lembaga masyarakat dalam membantu terlaksananya program pengembangan objek wisata Pantai Menganti. Keterlibatan lembaga tersebut merupakan bentuk penerapan kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Adapun lembaga yang secara khusus ditunjuk untuk membantu pemerintah desa dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sengkuyung Makmur. LMDH dipilih sebagai lembaga yang mengurus pariwisata karena di dalamnya mempunyai tujuan untuk memanfaatkan wilayah hutan dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan. Bentuk dari implementasi tersebut dapat dianalisis dengan mengacu pada variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Variabel ini dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2016:99) adapun variabel-variabel dalam metode ini sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus ditentukan dengan jelas supaya dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik. Dalam kaitannya pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memberdayakan LMDH untuk membantu menjalankan programnya. Adapun standar yang digunakan didasarkan pada tugas lembaga kemasyarakatan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasal 7, yaitu:

- Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, go-tong-royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Program pengembangan objek wisata Pantai Menganti membutuhkan peran serta masyarakat, hal ini termasuk bagian dari pemberdayaan masyarakat sejak dini. Maka yang menjadi sasaran adalah masyarakat itu sendiri. Hal tersebut juga menjadi tujuan dari pelaksanaan program supaya masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri melalui sektor pariwisata.

Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan program ini adalah sumber daya. Keberhasilan dari pengembangan objek wisata Pantai Menganti tidak hanya dilihat dari cara yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa saja. Akan tetapi juga dari lembaga masyarakat yang membantu dalam penyelenggaraan tugas dari pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Maka dari itu sumber daya dari standar kebijakan yang di analisis adalah Pemerintah Desa dan LMDH yang saling bekerjasama dalam upaya mengembangkan potensi objek wisata Pantai Menganti. Cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan SDM masyarakat Desa Karangduwur melalui pemberdayaan masyarakat.

Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Implementasi sebuah program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Pada tahap awal pengembangan objek wisata Pantai Menganti, pemerintah desa memerlukan lembaga untuk mengelola objek wisata secara khusus. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah desa memilih LMDH sebagai lembaga yang mengelola objek wisata Pantai Menganti. Kemudian dalam program pemberdayaan, pemerintah desa memiliki hubungan kerja sama dengan beberapa lembaga seperti; Perhutani, Disporapar, Polsek, Koramil, Tim SAR, dan CJSC. Lembaga tersebut berperan dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat di beberapa bidang terkait penyelenggaraan objek wisata Pantai Menganti.

Karakteristik agen pelaksana.

Terkait dengan pelaksanaannya, proses implementasi melibatkan Pemerintah Desa Karangduwur sebagai pembentuk lembaga kemasyarakatan, dan juga lembaga masyarakat yang membantu kelancaran program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan kebijakan yang diterapkan. Bentuk implementasi kebijakan ini memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi objek wisata Pantai Menganti. Sehingga masyarakat Desa Karangduwur mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya melalui keterlibatan dalam penyelenggaraan objek wisata Pantai Menganti.

Dalam pelaksanaannya, proses pemberdayaan masyarakat dimulai dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian pada tahap berikutnya dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki keahlian di bidang-bidang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan objek wisata. Selain itu pemerintah desa juga membuat suatu paguyuban sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dibantu oleh LMDH selaku pengelola, dibentuklah paguyuban warung yang memiliki fungsi dalam tata kelola pedagang. Melalui paguyuban tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pemanfaatan kawasan objek wisata di bidang usaha dagang.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Berhasil atau gagalnya kinerja implementasi kebijakan dapat dinilai dari faktor eksternal dalam mendorong keberhasilan kebijakan publik. Pada tahap awal pemerintah Desa Karangduwur masih kesulitan dalam melakukan sosialisasi terkait perencanaan. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat masih sangat kecil untuk ikut serta dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah desa. Masyarakat masih memiliki kepedulian yang kecil terhadap pembangunan pariwisata. Sehingga pemerintah desa dengan dibantu lembaga kemasyarakatan merangkul masyarakat untuk membangun kawasan objek wisata secara bersama-sama. Dengan cara yang sama pemerintah desa memberdayakan lembaga dan kelompok masyarakat yang ada di Desa Karangduwur untuk melakukan musyawarah. Usaha yang dilakukan mampu memberikan hasil, dimana masyarakat mau ikut serta membangun secara gotong royong. Meskipun dalam pelaksanaannya sempat terhambat dengan kondisi ekonomi, akan tetapi dapat teratasi dengan iuran swadaya yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pada pelaksanaannya pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah desa dengan dibantu lembaga dan kelompok masyarakat Desa Karangduwur. Kemudian melalui lembaga yang ada pemerintah desa memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan wawasan dan partisipasi masyarakat dengan cara sosialisasi dan musyawarah. Sehingga masyarakat mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui keterlibatan secara langsung pada penyelenggaraan objek wisata. Proses pemberdayaan tidak terlepas dari peran lembaga pemerintah dan swasta yang memberikan pembinaan dan pelatihan, lembaga tersebut antara lain; Disporapar, Perhutani, Polsek, Koramil dan CJSC. Pemberdayaan dilakukan berdasarkan tujuh tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pengkajian (*assessment*), tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap formalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi; (2) Pemberdayaan dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Desa Karangduwur dengan LMDH selaku pengelola objek wisata Pantai Menganti. Bentuk kerjasama tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupa-

ten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Penerapan kebijakan ini dinilai berdasarkan 5 variabel yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan lembaga dan kelompok masyarakat yang saling bekerja sama dengan pemerintah desa dalam mewujudkan perencanaan pembangunan objek wisata Pantai Menganti.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1) Pemerintah Desa Karangduwur sebaiknya lebih mengontrol jalannya penyelenggaraan objek wisata Pantai Menganti. Tidak hanya terjadi pada saat rapat desa atau rapat akhir tahun. Sehingga informasi yang masuk terkait penyelenggaraan objek wisata menjadi lebih detail dan dapat segera ditangani apabila ditemukan suatu permasalahan; (2) Pengelola sebaiknya meningkatkan intensitas rapat evaluasi yang melibatkan masyarakat. Sehingga ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan objek wisata Pantai Menganti; (3) Masyarakat sebaiknya lebih berani dalam mengeluarkan gagasan atau ide baik di perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga masyarakat tidak cenderung menerima segala keputusan tanpa mengeluarkan gagasan atau ide mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- AG. Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.J. Muljadi, 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aliyah, I., Yudana, G., & Sugiarti, R. 2020. *Desa Wisata Berwisata Ekobudaya: Kawasan Wisata Industri Lurik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Handoyo, Eko, 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Mardikanto, T., Soebiato, P. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maryani, D., dan Nainggolan, R.R.E., 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syamsul, Efri, 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri : FAM Publishing.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Tonny, Fredian, 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zaenuri, M, 2012. *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : e-Gov Publishing.
- Kadji, Yulianto, 2015. *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo : UNG Press Gorontalo.
- Jurnal, Skripsi, dan Tesis**
- Agow, Merry Virginia, dkk. *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PANTAI LAKBAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA*. *...*
- Anggraeni, Lisa. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Kewirausahaan Jamu Gendong di kampung Jamu Gemawang Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Anom, I Putu. 2013. *POTENSI KEPARIWISATAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi Kasus di Kawasan Pariwisata Komodo)*. Vol 13, No 1, Hal 112. Bali: Fakultas Pariwisata Unud.
- Aprilia, Eka R., dkk. 2017. *PENGARUH DAYA TARIK WISATA DAN FASILITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN DI PANTAI BALEKAMBANG KABUPATEN MALANG*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 51 No 2. Malang: Universitas Brawijaya.
- Dalimunthe, Naruddin. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Efendi, Hidayat. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Wisata di Objek Wisata Pantai Menganti Kebumen*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Hadiyanti, Puji, 2008. *STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KETERAMPILAN PRODUKTIF DI PKBM RAWASARI, JAKARTA TIMUR*. [online] <https://media.neliti.com> (diakses pada 07 Maret 2020. Pukul 20.30).
- Nursidik, Fajar, 2013. *STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN (STUDI EMPIRIS DI KELURAHAN BANDUNG KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO*. [online] <https://journal.unnes.ac.id> (diakses pada 07 Maret 2020. Pukul 22.00)
- Undang-undang dan Peraturan Daerah**
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. 2007. *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan*.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa*.
- Website**
- <https://karangduwur.kec-ayah.kebumenkab.go.id> (diakses 15 Oktober 2020. Pukul 20.00).
- <https://perhutani.co.id/pengembangan-menganti-menjadi-destinasi-wisata-pantai-geopark-dunia/> (diakses, 20 Desember 2020. Pukul 22.00).
- <https://www.facebook.com/karangtarunaputraremaj> (diakses 27 Oktober 2020. Pukul 19.30).
- <https://www.facebook.com/Desawisatakarangduwur> (diakses 21 Desember 2020. Pukul 19.50)
- <https://www.facebook.com/pantaimengantikbm> (diakses 27 Oktober 2020. Pukul 22.00)